



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 53/ 054/ HK/ 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

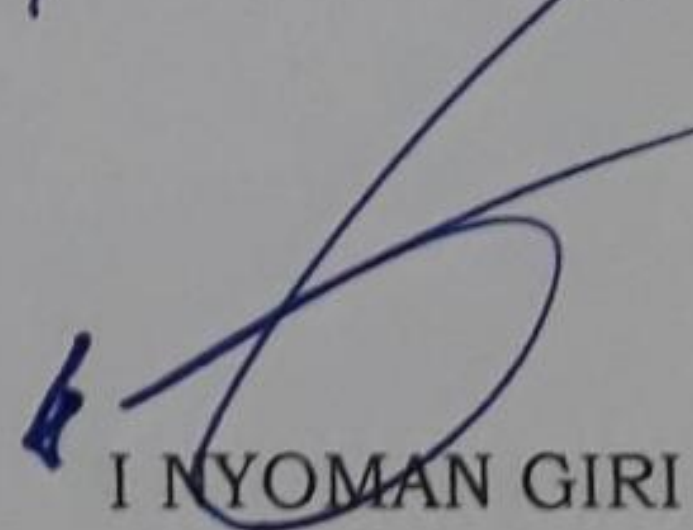
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Wakil Bupati Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

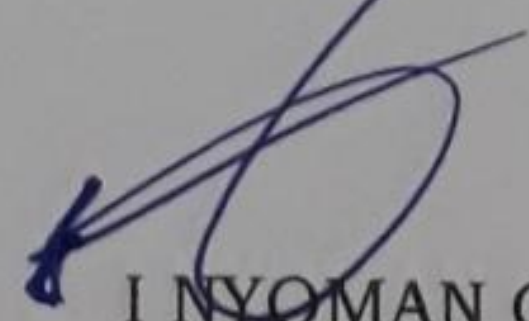
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 53/054/HK/2020
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

DAFTAR SOP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA	NOMOR
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	069.2/1481/BPKAD
2	Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	069.2/1482/BPKAD
3	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	069.2/1483/BPKAD
4	Penyusunan Usulan Dokumen Perencanaan	069.2/1484/BPKAD
5	Pengumpulan Dokumen Administrasi Untuk Kepentingan Pemeriksaan	069.2/1485/BPKAD
6	Penyusunan DPA-PD dan Anggaran Kas Perangkat Daerah	069.2/1486/BPKAD
7	Penerbitan SPP UP/TU/TU	069.2/1487/BPKAD
8	Penerbitan SPP GU	069.2/1488/BPKAD
9	Penerbitan SPP-LS Gaji dan Tunjangan	069.2/1489/BPKAD
10	Penerbitan SPP-LS Barang dan Jasa	069.2/1490/BPKAD
11	Penerbitan SPM	069.2/1491/BPKAD
12	Penyusunan SPJ	069.2/1492/BPKAD
13	Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Badung (Belanja Tidak Langsung PPKD)	069.2/1493/BPKAD
14	Penyusunan Data Kepegawaian	069.2/1494/BPKAD
15	Penyusunan Laporan Administrasi Kepegawaian	069.2/1495/BPKAD
16	Penyusunan Administrasi ASN Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis	069.2/1496/BPKAD
17	Penerimaan Naskah Dinas	069.2/1497/BPKAD
18	Pendistribusian Naskah Dinas	069.2/1498/BPKAD
19	Pelaksanaan Dokumentasi (Foto)	069.2/1499/BPKAD
20	Penataan Arsip	069.2/1500/BPKAD
21	Pengadaan < 50 Juta	069.2/1501/BPKAD
22	Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	069.2/1502/BPKAD
23	Penyusunan KIB dan KIR	069.2/1503/BPKAD
24	Pemeliharaan Barang Inventaris	069.2/1504/BPKAD
25	Pendistribusian Barang Inventaris	069.2/1505/BPKAD
26	Penghapusan Barang Inventaris	069.2/1506/BPKAD
27	Penyusunan SPT	069.2/1507/BPKAD
28	Penyusunan SPD	069.2/1508/BPKAD
29	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	069.2/1509/BPKAD
30	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) JFU	069.2/1510/BPKAD
31	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kasubbag	069.2/1511/BPKAD
32	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	069.2/1512/BPKAD
33	Asuransi Aset Milik Daerah Kabupaten Badung	069.2/1513/BPKAD
34	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	069.2/1514/BPKAD
35	Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung	069.2/1515/BPKAD
36	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Badung	069.2/1516/BPKAD
37	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	069.2/1517/BPKAD

38	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	069.2/1518/BPKAD
39	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	069.2/1519/BPKAD
40	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	069.2/1520/BPKAD
41	Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	069.2/1521/BPKAD
42	Penyusunan Peraturan – Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	069.2/1522/BPKAD
43	Pencetakan Buku APBD	069.2/1523/BPKAD
44	Penelitian Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak Langsung (RKA) BTL	069.2/1524/BPKAD
45	Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Triwulan	069.2/1525/BPKAD
46	Pembuatan Pencatatan dan Pelaporan Semester	069.2/1526/BPKAD
47	Penelitian Laporan Keuangan dan Perangkat Daerah	069.2/1527/BPKAD
48	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	069.2/1528/BPKAD
49	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup	069.2/1529/BPKAD
50	Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	069.2/1530/BPKAD
• 51	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	069.2/1531/BPKAD
• 52	Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Badung	069.2/1532/BPKAD
• 53	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	069.2/1533/BPKAD
• 54	Sewa Barang Milik Daerah	069.2/1534/BPKAD
• 55	Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah Barang Milik daerah	069.2/1535/BPKAD
• 56	Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	069.2/1536/BPKAD
• 57	Penyertaan Modal Barang Milik Daerah	069.2/1537/BPKAD
• 58	Tukar – Menukar Barang Milik Daerah	069.2/1538/BPKAD
• 59	Hibah Barang Milik Daerah	069.2/1539/BPKAD
• 60	Penjualan Barang Milik Daerah	069.2/1540/BPKAD
• 61	Pemusnahan Barang Milik Daerah (Pengguna Barang)	069.2/1541/BPKAD
• 62	Pemusnahan Barang Milik Daerah (Pengelola Barang)	069.2/1542/BPKAD
• 63	Penghapusan Barang Milik Daerah	069.2/1543/BPKAD
• 64	Inventarisasi Barang Milik Daerah	069.2/1544/BPKAD
• 65	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	069.2/1545/BPKAD

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA